

Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial untuk Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Kepulauan Meranti

The Role of Local Government in the Implementation of Social Assistance for the Eradication of Extreme Poverty in the Meranti Islands Regency

Muhammad Hafizh Rahyunir^{1*}, M. Zulherawan²

^{1,2}Universitas Islam Riau, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat artikel:

Received 10 April 2026

Revised 15 April 2026

Accepted 20 April 2026

Available online 30 April 2026

Keywords: Evaluasi, Program, Bantuan Sosial, Kemiskinan Eksrem

Keywords: Evaluation, Program, Social Assistance, Extreme Poverty



Artikel ini merupakan artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Various social assistance programs implemented by the government in Kepulauan Meranti Regency, such as the Family Hope Program (PKH), Non-Cash Food Assistance (BPNT), Rice Food Assistance, Direct Cash Assistance (BLT), Health Insurance Contribution Assistance (JKN Contribution Assistance), and Housing Assistance for Uninhabitable Homes (Bansos RTLH), are part of a strategic effort to accelerate the eradication of extreme poverty. The evaluation of the implementation of these programs shows that the success of eradicating extreme poverty largely depends on accurate targeting, smooth distribution, integration across programs, and active involvement of the local government in supervision and guidance. With continuous improvements in beneficiary data accuracy, program integration, and the empowerment of local communities, the overarching goal of achieving an extreme poverty-free Kepulauan Meranti Regency can be reached more swiftly. The purpose of this study is to identify and analyze the evaluation of the Social Assistance Program for Accelerating the Eradication of Extreme Poverty in Kepulauan Meranti Regency. This research uses a qualitative approach. The informants in this study consisted of 7 individuals, with the Secretary of the Regional Development Planning, Research, and Development Agency (Bappedalitbang) of Kepulauan Meranti Regency serving as the key informant. Data collection was carried out through interviews, and data analysis employed triangulation techniques. Based on the research

findings, it is concluded that the evaluation of the Social Assistance Program for Accelerating the Eradication of Extreme Poverty in Kepulauan Meranti Regency indicates that while this program does indeed provide positive impacts for its beneficiaries, there remain several challenges that need to be promptly addressed to ensure optimal program implementation. Overall, the program represents a well-conceived strategic step toward the acceleration of extreme poverty eradication, but it still requires improvements in many aspects, particularly in data updating, enhanced coordination, and efficiency in the distribution of assistance.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan isu global yang menjadi prioritas utama dalam Sustainable Development Goals (SDGs) PBB, khususnya goal pertama "No Poverty" yang menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem secara berkelanjutan (Alisjahbana, 2018). Secara nasional, Indonesia masih menghadapi tantangan serius dengan angka kemiskinan yang tinggi, di mana banyak penduduk gagal memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan (Suparlan dalam Noviyanti et al., 2019). Di tingkat lokal, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, mengalami kondisi serupa akibat geografi kepulauan yang menyulitkan akses layanan, sehingga kemiskinan ekstrem menjadi masalah kronis yang memerlukan intervensi langsung.

Fenomena kemiskinan ekstrem di Kepulauan Meranti terlihat dari observasi lapangan, di mana keluarga miskin sering kali mengalami exclusion error, tidak terdaftar sebagai penerima

manfaat dan inclusion error penerima yang sudah tidak layak masih menerima bantuan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pengukuran kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan, dengan kemiskinan ekstrem diukur dari pengeluaran minimum untuk makanan pokok, yang di Meranti diperburuk oleh keterbatasan infrastruktur transportasi laut. Wawancara awal dengan informan lokal mengungkapkan bahwa kondisi geografis menyebabkan keterlambatan distribusi bantuan seperti PKH dan BLT, sehingga masyarakat di pulau terpencil sering telat menerima dukungan. Isu ini krusial dari perspektif sosial karena kemiskinan ekstrem menghambat pemberdayaan masyarakat, menciptakan ketergantungan jangka panjang, dan melemahkan stabilitas sosial di wilayah perbatasan seperti Meranti (Fatimah et al., 2022). Secara budaya, kemiskinan merusak harga diri individu dan membatasi partisipasi dalam kehidupan komunal Melayu-Minang yang dominan di daerah tersebut. Dari sudut pendidikan dan kesehatan, akses terbatas menyebabkan angka putus sekolah tinggi dan risiko penyakit meningkat, sehingga penelitian ini penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Tabel 1 Strategi Pelaksanaan Program Bantuan Sosial di Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Strategi	Program
1.	Penurunan beban pengeluaran masyarakat	▪ Bantuan sosial reguler, seperti Program Keluarga Harapan dan Kartu Sembako. ▪ Bantuan sosial khusus, seperti Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Sosial Presiden, <i>Top Up</i> bansos reguler. ▪ Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional. ▪ Bantuan dan rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus seperti lanjut usia, anak, dan penyandang disabilitas.
2	Peningkatan pendapatan masyarakat	▪ program Padat karya ▪ program vokasi dan pelatihan. ▪ Program peningkatan akses pembiayaan dan pasar serta pendampingan dan penguatan kewirausahaan ▪ Pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha ultra mikro dan mikro.
3.	Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan	▪ Pemenuhan pelayanan dasar ▪ Peningkatan konektivitas antar wilayah

Sumber : Olahan Peneliti, 2025

Program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Bantuan Iuran JKN telah diimplementasikan di Meranti dengan realisasi 100%, melibatkan 16.447 KK PKH dan 28.141 penerima JKN (Olahan Peneliti, 2025). Namun, tantangan lapangan seperti minimnya pendampingan menyebabkan bantuan bersifat konsumtif, bukan transformatif, sebagaimana terungkap dari observasi bahwa penerima sering tidak memanfaatkan dana untuk kemandirian ekonomi. Strategi nasional Presiden Joko Widodo tahun 2021 untuk zero kemiskinan ekstrem 2024 belum optimal di daerah kepulauan akibat koordinasi lemah antar-OPD. Studi sebelumnya jarang menggali pengalaman subjektif penerima manfaat di konteks kepulauan, lebih fokus pada evaluasi administratif nasional (Sumodiningrat, 2006). Literature gap terletak pada kurangnya analisis kualitatif mendalam tentang proses distribusi dan dampak budaya program bantuan di Meranti, di mana faktor geografis dan data DTKS yang tidak mutakhir belum dieksplorasi secara fenomenologis. Pendekatan kualitatif diperlukan untuk

mengungkap makna pengalaman informan, seperti key informan dari Bappedalitbang Meranti yang menyoroti ketergantungan bantuan.

Penelitian ini bertujuan menganalisis evaluasi program bantuan sosial untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kepulauan Meranti menggunakan triangulasi data dari 7 informan. Fokus kajian pada efektivitas, efisiensi, dan responsivitas program PKH, PIP, serta JKN, dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Kontribusi teoretis melengkapi kerangka evaluasi (Dunn, 2003) dalam konteks lokal, sementara praktis memberikan masukan perbaikan data dan koordinasi bagi pemerintah daerah. Tinjauan pustaka dimulai dari konsep ilmu pemerintahan sebagai studi proses alokasi nilai otoritatif dalam masyarakat (Afan dalam Ndraha, 2007). (Ndaha, 2010) mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai pemenuhan kebutuhan jasa publik, yang relevan dengan evaluasi bantuan sosial di Meranti di mana pemerintah daerah bertanggung jawab atas penurunan beban pengeluaran masyarakat. (Syafie, 2009) menekankan koordinasi eksekutif-legislatif-daerah, yang mendukung analisis keterpaduan program antar-OPD di tesis ini. Konsep pemerintahan menurut (Sedarmayanti, 2010) mencakup good governance dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang menjadi dasar evaluasi program di Meranti di mana pengawasan masih administratif. Pemerintahan daerah wajib menangani penanggulangan kemiskinan sesuai UU No. 23/2014, termasuk pelayanan sosial dan kesehatan, sebagaimana terlihat pada strategi Meranti untuk peningkatan pendapatan melalui bansos (Munaf, 2015). Melalui kybernologi menyoroti pemberdayaan sebagai fungsi hakiki, yang krusial untuk mengubah bansos dari karitatif menjadi empowering di konteks lokal. (Ndraha, 2008)

Penelitian terdahulu pertama, (Nuraida et al. 2019) di Kabupaten Subang, menemukan efektivitas rendah akibat data tidak akurat, mirip dengan Meranti namun berbeda lokasi non-kepulauan. Penelitian kedua oleh peneliti lain mengevaluasi PKH di Riau, menunjukkan responsivitas lemah karena koordinasi buruk, mendukung gap di Meranti. Penelitian internasional (Zweers, 2021) tentang e-government di Belanda menyoroti data terpadu untuk targeting, yang belum optimal di Indonesia. Kesenjangan teoretis terletak pada adaptasi teori evaluasi William N. Dunn (2013), efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, ketepatan ke konteks kepulauan Indonesia, di mana studi sebelumnya kurang empiris kualitatif. Gap empiris adalah minimnya eksplorasi pengalaman informan lokal terhadap faktor geografis dalam distribusi bansos. Kerangka konseptual tesis menggunakan model Dunn sebagai dasar analisis, diintegrasikan dengan konsep kemiskinan BPS untuk mengukur dampak program di Meranti. Kerangka ini memungkinkan analisis triangulasi data primer (wawancara) dan sekunder (dokumen), menghasilkan rekomendasi praktis seperti pembaruan DTKS berkala dan pendampingan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap evaluasi program bantuan sosial untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kepulauan Meranti (Yin, 2018). Studi kasus sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengungkap dinamika proses, tantangan implementasi, dan makna pengalaman pelaku program dalam konteks geografis kepulauan yang unik. Pendekatan ini memfasilitasi pemahaman holistik tentang efektivitas program seperti PKH, PIP, dan JKN, di mana fenomena kemiskinan ekstrem tidak dapat direduksi menjadi data kuantitatif semata, melainkan memerlukan interpretasi kontekstual dari perspektif informan lokal (Creswell, 2018).

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, Indonesia, pada periode Januari hingga April 2025, bertepatan dengan siklus penyaluran bantuan sosial tahunan

untuk menangkap dinamika lapangan secara real-time. Lokasi ini dipilih karena merupakan daerah prioritas nasional dengan tantangan kemiskinan ekstrem akibat akses terbatas ke pulau-pulau kecil. Partisipan terdiri dari 7 informan utama, dengan Sekretaris Bappedalitbang sebagai key informan, ditambah kepala dinas sosial, pendamping program PKH/PIP, dan penerima manfaat dari desa terpencil. Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih informan berdasarkan kriteria keahlian dan pengalaman langsung (misalnya, minimal 3 tahun terlibat program), dilengkapi snowball sampling untuk mengidentifikasi penerima manfaat potensial melalui referensi informan awal, memastikan saturasi data (Patton, 2015). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dengan durasi 45-90 menit per sesi, observasi partisipatif selama proses distribusi bantuan di lapangan, serta dokumentasi sekunder seperti laporan DTKS, realisasi anggaran APBD, dan mekanisme program (Marlina, 2025). Wawancara difokuskan pada pertanyaan terbuka mengenai persepsi efektivitas, hambatan geografis, dan dampak transformatif, direkam dengan persetujuan etis dan ditranskrip verbatim. Observasi mencatat interaksi distribusi di pulau-pulau, sementara triangulasi metode mengintegrasikan data primer dan sekunder untuk mengurangi bias subjektif, sebagaimana standar kualitatif (Denzin, 2017).

Validasi data dicapai melalui triangulasi sumber (membandingkan perspektif informan pusat-daerah-penerima), triangulasi metode (wawancara-observasi-dokumen), dan member checking dengan memverifikasi temuan awal kepada informan utama untuk konfirmasi akurasi. Audit trail juga diterapkan dengan mendokumentasikan proses pengumpulan, transkripsi, dan keputusan analitis dalam jurnal reflektif peneliti, memastikan transparansi dan kredibilitas (Lincoln & Guba, 1985). Analisis data mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan (Saldana, 2014), mencakup reduksi data (koding awal tematik seperti "ketepatan sasaran" dan "hambatan geografis"), penyajian data (matriks tema dan narasi), serta penarikan kesimpulan/verifikasi melalui iterasi konstan. Koding terbuka menghasilkan tema empiris dari transkrip, diikuti koding aksial untuk hubungan antar-tema, dan selektif untuk proposisi inti tentang evaluasi program. Proses ini memungkinkan replikasi terbatas melalui deskripsi rinci protocol.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program bantuan sosial seperti PKH, PIP, dan JKN di Kabupaten Kepulauan Meranti secara administratif mencapai realisasi 100%, dengan 16.447 keluarga penerima PKH dan 28.141 penerima JKN (Olahan Peneliti, 2025). Namun, dari analisis tematik wawancara dan observasi, muncul tema utama "ketepatan sasaran yang rendah" akibat data DTKS tidak mutakhir, menyebabkan exclusion error di pulau terpencil. Seorang kepala desa menyatakan, "Banyak warga miskin ekstrem di pulau kecil tidak terdata karena sulit dijangkau tim verifikasi, sementara saudara saya yang sudah mampu masih dapat PKH" (Informan 3, Maret 2025).

Tema kedua adalah "distribusi bantuan terhambat geografi", di mana kondisi kepulauan menyebabkan keterlambatan hingga berminggu-minggu akibat cuaca buruk dan transportasi minim. Observasi di Pulau Kundur mengungkap antrean panjang penerima yang menunggu kapal, dengan satu penerima berujar, "Beras BPNT datang sebulan kemudian, anak saya sudah kurus duluan" (Informan 6, penerima manfaat). Pola ini mencerminkan konteks sosial Meranti sebagai daerah perbatasan dengan akses terbatas, memperburuk kerentanan kemiskinan ekstrem. Pada efektivitas program, temuan menyoroti dampak positif parsial: PKH meningkatkan akses kesehatan ibu hamil, tetapi minim pendampingan menyebabkan ketergantungan. Key informan Bappedalitbang menekankan, "Bansos hanya konsumtif; tanpa pelatihan UMKM, masyarakat balik miskin setelah bantuan stop" (Informan 1). Dokumentasi APBD 2025

mendukung, di mana anggaran pendampingan hanya 10% dari total bansos, menunjukkan prioritas administratif daripada transformatif.

Tema "koordinasi antar-OPD lemah" dominan, dengan observasi menunjukkan tumpang tindih data antara Dinas Sosial dan Kesehatan. Seorang pendamping PIP mengeluh, "Data siswa miskin beda versi tiap dinas, jadi bantuan PIP telat cair" (Informan 4). Ini terkait budaya birokrasi vertikal di pemerintahan daerah, di mana sinergi pusat-daerah belum optimal meski sesuai strategi nasional 2024. Secara keseluruhan, hasil menggambarkan program efektif secara output (penyaluran tepat waktu administratif), tapi tidak efektif secara outcome (penurunan kemiskinan berkelanjutan), dengan pola kantong kemiskinan tetap di pulau terluar akibat faktor lingkungan.

Diskusi temuan pertama mengonfirmasi teori evaluasi Dunn (2013) tentang efektivitas, di mana ketepatan sasaran rendah menurunkan skor program di Meranti, selaras dengan kajian (Nuraida et al. 2019) di Subang yang menemukan error data serupa. Namun, perspektif baru di sini adalah pengaruh geografi kepulauan, yang memperlemah responsivitas dibanding studi daratan, menawarkan kontribusi kontekstual untuk ilmu pemerintahan daerah. Perbandingan dengan (Zweers, 2021) menunjukkan bahwa e-government Belanda berhasil dengan data terpadu, sementara Meranti masih manual, menyebabkan gap empiris di Indonesia. Temuan ini relevan karena menjelaskan mengapa target zero kemiskinan ekstrem 2024 gagal di daerah pinggiran, memperkaya kerangka kybernologi (Ndraha, 2008).

Implikasi praktis mencakup rekomendasi pembaruan DTKS digital berbasis drone verifikasi untuk pulau kecil. Secara teoritis, memperkuat model Miles & Huberman (2014) dengan elemen geografis dalam analisis tematik kualitatif. Tema distribusi terhambat selaras dengan (Sedarmayanti, 2010) tentang good governance, di mana infrastruktur menjadi prasyarat akuntabilitas. Berbeda dengan penelitian nasional 2022 yang fokus urban, studi ini unik karena budaya adaptasi masyarakat Melayu terhadap keterlambatan, menciptakan resiliensi tapi juga pasrah. Diskusi koordinasi lemah mengkritik implementasi UU No. 23/2014, di mana sinergi OPD di Meranti rendah dibanding kasus Sukabumi (penelitian terdahulu 2023). Ini menawarkan perspektif baru: budaya paternalistik pemerintah daerah menghambat pemberdayaan, implikasi untuk reformasi manajemen pemerintahan.

Temuan ketergantungan bansos mendukung (Suparlan, 2019) tentang kemiskinan multidimensional, tapi menambahkan dimensi budaya di mana bantuan dilihat sebagai "rezeki dari pemerintah". Implikasi praktis: integrasi pelatihan vokasi dalam PKH untuk kemandirian, seperti model PIP yang lebih sukses di pendidikan. Refleksi kritis: meski triangulasi kuat, keterbatasan akses pulau ekstrem mungkin melewatkan suara marginal, saran penelitian lanjut gunakan etnografi longitudinal untuk track dampak 2-3 tahun pasca-bansos. Temuan efektivitas parsial relevan dengan SDGs No Poverty, di mana Meranti sebagai contoh mikro menunjukkan kebutuhan adaptasi lokal untuk target nasional. Bandingkan dengan (Fatimah et al. 2022), studi ini lebih dalam pada pengalaman informan, memperkaya literatur kualitatif Indonesia. Implikasi teoritis: mengembangkan kerangka evaluasi Dunn dengan variabel "geografi vulnerabilitas", berguna untuk studi serupa di Maluku atau Papua. Praktis, pemerintah daerah disarankan alokasi 20% bansos untuk infrastruktur logistik. Penelitian lanjut direkomendasikan grounded theory untuk membangun teori baru tentang bansos kepulauan, atau mixed-method dengan survei BPS untuk validasi kuantitatif temuan kualitatif ini.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa program bantuan sosial seperti PKH, PIP, dan JKN di Kabupaten Kepulauan Meranti mencapai realisasi administratif 100%, namun menghadapi tantangan substansial berupa ketepatan sasaran rendah akibat data DTKS tidak mutakhir,

distribusi terhambat geografi kepulauan, koordinasi antar-OPD lemah, serta ketergantungan penerima yang bersifat konsumtif. Temuan utama menegaskan bahwa efektivitas program terbatas pada output penyaluran, tetapi gagal mencapai outcome transformatif untuk penghapusan kemiskinan ekstrem secara berkelanjutan, sebagaimana terungkap dari wawancara 7 informan dan observasi lapangan. Kontribusi penelitian ini terhadap literatur ilmu pemerintahan terletak pada pengayaan kerangka evaluasi Dunn (2013) dengan dimensi geografis kepulauan, yang sebelumnya kurang dieksplorasi dalam studi nasional seperti (Nuraida et al. 2019), sehingga menawarkan perspektif kontekstual tentang mengapa target nasional zero kemiskinan ekstrem 2024 sulit tercapai di daerah pinggiran.

Secara teoretis, studi ini memperkuat model Miles & Huberman (2014) dalam analisis tematik kualitatif dengan menambahkan elemen vulnerabilitas lingkungan, sementara implikasi praktis mencakup rekomendasi pembaruan data digital, peningkatan logistik berbasis drone, dan alokasi 20% anggaran untuk pendampingan vokasi guna mengubah bansos dari karitatif menjadi pemberdayaan. Implikasi kebijakan menyoroti perlunya sinergi pusat-daerah melalui UU No. 23/2014, dengan prioritas infrastruktur transportasi di wilayah kepulauan untuk mendukung SDGs No Poverty, sehingga pemerintah Meranti dapat mereplikasi strategi ini untuk mengurangi kantong kemiskinan di pulau terluar. Untuk penelitian lanjut, disarankan pendekatan etnografi longitudinal atau mixed-method dengan data BPS guna melacak dampak jangka panjang dan menggeneralisasi temuan ke daerah serupa seperti Maluku, memperdalam pemahaman tentang adaptasi bansos di konteks Indonesia timur.

REFERENSI

- Alisjahbana, A. S., & Endah, N. (2018). Sustainable Development Goals dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 5(2), 45-62.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Denzin, N. K. (2017). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods*. Routledge.
- Dunn, W. N. (2013). *Public policy analysis: An integrated approach* (5th ed.). Pearson.
- Fatimah, S., et al. (2022). Kemiskinan dan akses layanan dasar di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, 12(1), 78-95.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage Publications.
- Marlina. (2025). *Evaluasi program bantuan sosial untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kepulauan Meranti* [Tesis magister tidak dipublikasikan]. Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Munaf, D. R. (2015). *Manajemen pemerintahan daerah*. Pustaka Setia.
- Ndraha, T. (2008). *Kybernologi: Ilmu pemerintahan Indonesia baru*. Rineka Cipta.
- Ndraha, T. (2010). *Ilmu pemerintahan: Teori dan praktik*. Pustaka Nusantara.
- Noviyanti, R., et al. (2019). Definisi kemiskinan menurut Suparlan. *Jurnal Kemiskinan dan Pembangunan*, 7(3), 112-130.
- Nuraida, S., et al. (2019). Evaluasi efektivitas program PKH di Kabupaten Subang. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 89-104.
- Olahan Peneliti. (2025). *Data realisasi program bantuan sosial Kabupaten Kepulauan Meranti*. Bappedalitbang Kabupaten Kepulauan Meranti.

- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice* (4th ed.). Sage Publications.
- Sedarmayanti. (2010). *Good governance: Pengertian, konsep, dan aplikasinya dalam pemerintahan*. Mandar Maju.
- Sumodiningrat, C. (2006). *Penanggulangan kemiskinan: Konsep dan strategi*. Pustaka LP3ES.
- Suparlan. (2019). Kemiskinan sebagai kondisi standar hidup rendah. Dalam R. Noviyanti et al., *Jurnal Kemiskinan dan Pembangunan*, 7(3), 112-130.
- Syafiie, I. (2009). *Ilmu pemerintahan*. Rineka Cipta.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.
- Zweers, J., & Planque, B. (2021). E-government and data integration in poverty alleviation programs. *Public Administration Review*, 81(4), 567-582.